



Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Analisis Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2020

C. Prahastuti^{a,*}

^aAnalisis Pengembangan Infrastruktur, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Jl ZA Pagar Alam KM 11 Rajabasa Bandar Lampung

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima 30 Agustus 2021
Direvisi 18 November 2021
Diterbitkan 24 Desember 2021

Kata kunci:

Indikator Kinerja
Survei kondisi
Kemantapan jalan

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung memerlukan sebuah alat analisis dalam upayanya untuk menghadirkan pertanggungjawaban secara tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Untuk itu diperlukan sebuah dokumen Laporan Kinerja untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Penyusun melaksanakan analisis yang diperlukan dalam dokumen ini agar dapat menggambarkan kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, selain itu penyusun juga melakukan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dinas. Analisis kinerja ini dibatasi hanya pada Tahun Anggaran 2020 dimana Pemerintah Provinsi Lampung mengelola jalan sepanjang 1693,273 KM yang tersebar di 16 koridor jalan. Dalam Renstra 2019-2024 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dengan indikator tersebut mencapai nilai 96,26%. Dari pengukuran sasaran, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung mencapai kriteria sangat baik, karena memperoleh capaian lebih dari 90%.

1. Pendahuluan

Prasarana jalan dan jembatan pada hakikatnya mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan bidang ekonomi, perkembangan antar daerah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan dan pengembangan sosial budaya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pentingnya peran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung tercermin pada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas pemenuhan kebutuhan prasarana jalan dan jembatan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan harus dilaksanakan secara terus-menerus. Ironisnya, jumlah panjang jalan dan jembatan yang harus ditangani tidak seimbang dengan jumlah anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya. Akibatnya kondisi jalan dan jembatan yang ada terancam mengalami penurunan dari tahun ke tahun, oleh karena itu diperlukan suatu rencana strategis untuk mengatasi hal ini, sehingga anggaran yang jumlahnya terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan pada akhirnya kondisi jalan dan jembatan dapat dipertahankan tetap mantap sepanjang tahun.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan

pemerintahan provinsi di bidang Kebinaamargaan (jalan/jembatan) dan Bina Konstruksi berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengukur kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung diperlukan sebuah alat analisis dalam upayanya untuk menghadirkan pertanggungjawaban secara tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Untuk itu diperlukan sebuah dokumen Laporan Kinerja untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

1.1. Landasan teori

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, menugaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada misi "Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah" di Provinsi Lampung

dengan menasar kepada peningkatan kondisi kemandapan jalan provinsi guna meningkatkan konektivitas antar wilayah menggunakan indikator tingkat kemandapan jalan provinsi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13 /PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan menyebutkan bahwa jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

Indikator kemandapan jalan ini harus dilaporkan kepada kepala daerah sebagaimana Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Tingkat Kemandapan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kondisi Kemandapan Jalan Provinsi	Persentase Tingkat kondisi Kemandapan Jalan Provinsi	%	79	80	81	82	83

Sumber: Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 2019-2024

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
1	Meningkatkan Kondisi Kemandapan Jalan Provinsi	Tingkat Kondisi Kemandapan Jalan provinsi	%	Mendukung kondisi kemandapan jalan provinsi	(Total kondisi jalan baik ditambah sedang / total panjang Ruas Provinsi) * 100	Hasil Survey Kondisi Jalan	Memenuhi target jalan mantap sebesar 79 % pada tahun 2020

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kondisi Kemandapan Jalan Provinsi	Tingkat Kondisi Kemandapan Jalan provinsi	%	79

Tabel 4. Kondisi Ruas Jalan Provinsi Tahun 2016-2020

No	TAHUN	PANJANG RUAS PROVINSI (Km)	KONDISI							
			MANTAP				TIDAK MANTAP			
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2016	1.693.273	1.018.877	60.17	166.755	9.85	108.010	6.38	399.632	23.60
2	2017	1693.273	1091.340	64.45	213.152	12.59	71.024	4.19	317.757	18.77
3	2018	1693.273	1140.178	67.336	167.481	9.98	85.756	5.07	299.558	17.71
4	2019	1693.273	1.121.801	66.250	138.239	8.16	90.343	5.34	342.890	20.25
5	2020	1693.273	1091.243	64.446	196.398	11.599	239.435	14.140	166.197	9.815

Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa laporan tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi memiliki Target Indikator dari Tujuan yang akan dicapai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) terkait bidang jalan dan jembatan berdasarkan arahan/misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 disajikan dalam Tabel 1.

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan dalam Tabel 2.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dengan Gubernur Lampung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah seperti disajikan dalam Tabel 3.

2. Metodologi

2.1 Metode pengumpulan data

Kondisi kemandapan jalan dilakukan melalui program Survei dan Database Jalan/Jembatan kegiatan survei (Despa, 2021) kondisi kemandapan jalan jembatan. Survei dilaksanakan pada 99 ruas jalan Provinsi Lampung, dengan panjang jalan 1693,273 km. Pelaksanaan survei ini dilaksanakan menggunakan Perhitungan Surface Distress Index (SDI), dengan memperhatikan 4 unsur sebagai dukungan yaitu: persentase (%) luas retak, rata-rata lebar retak, jumlah lubang / km dan rata-rata kedalaman rutting bekas roda. Hasil survei kondisi jalan tahun 2016 s.d. 2020 ditampilkan pada Tabel 4.

Sesuai dengan definisi jalan dengan kondisi pelayanan mantap maka presentase jalan Provinsi Lampung dengan kondisi pelayanan mantap adalah akumulasi jalan yang berada pada kondisi baik dan sedang, yaitu sebesar 76,045%.

2.2 Metode analisis

Analisis kinerja dinas dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian kinerja (Rohmalia 2021) dinas dengan realisasinya, yaitu membandingkan antara target pencapaian kinerja kondisi kemandapan jalan Provinsi Lampung tahun 2020 yang tercantum pada Tabel 3 dengan realisasi yang didapatkan dari hasil survei kondisi kemandapan jalan tahun 2020 yang tertera pada Tabel 4.

Predikat nilai capaian kinerja (Martinus, 2020) dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seperti ditampilkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Kondisi Ruas Jalan Provinsi Tahun 2016-2020

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat rendah

Analisis dilakukan terhadap realisasi pencapaian target melalui beberapa parameter seperti:

1. Anggaran yang disediakan Pemerintah Provinsi Lampung
2. Teknis pelaksanaan konstruksi jalan
3. Kondisi topografi alam
4. Praktik penggunaan jalan
5. Volume lalu lintas dan tonase kendaraan
6. Faktor non teknis lainnya

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Tahun 2020

Setelah dilakukan komparasi antara target kinerja dinas pada tahun 2020 yaitu tingkat kondisi kemandapan jalan provinsi sebesar 79% dengan realisasi sebesar 76,045% maka dapat diukur bahwa pencapaian realisasi terhadap target kondisi kemandapan jalan tahun 2020 adalah sebesar 96,11%.

Pencapaian realisasi kinerja pada angka ini termasuk pada interval penilaian sangat tinggi, terjadi kenaikan realisasi dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2019 yang mencapai 95,40%, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 7.

3.2 Analisis pencapaian kinerja

Secara umum pencapaian kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2020 sangat baik, tetapi belum mencapai target kondisi kemandapan jalan sebesar 79%. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

1. Keterbatasan Anggaran (Budget Constraint)
2. Rasionalisasi anggaran pandemi Covid-19
3. Kualitas pekerjaan yang masih belum maksimal
4. Tingginya angka degradasi kondisi kemandapan jalan Provinsi
5. Tingginya pertumbuhan volume lalu lintas
6. Semakin banyaknya pemanfaatan rumija oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tingkat Kondisi Kemantapan Jalan provinsi	%	79	75,924	96,26

Tabel 7. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Tingkat Kondisi Kemantapan Jalan provinsi	%	78	74.414	95.40	79	76.045	96.26

Adapun usulan strategi pemecahan masalah yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung pada T.A 2020 sebagai berikut:

1. Peningkatan kondisi kemantapan jalan provinsi dengan prioritas pada ruas jalan strategis penggerak ekonomi kewilayahan;
2. Upaya strategi pendanaan infrastruktur secara kreatif untuk mengatasi kendala Budget Constraint;
3. Penataan kembali fungsi dan status jalan;
4. Mendorong peningkatan ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional, dan sinergi pembangunan dengan kabupaten/kota.

4. Kesimpulan

Pencapaian kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2020 sangat baik, terjadi peningkatan pencapaian kinerja dari tahun sebelumnya, tetapi masih belum mencapai target kinerja yang diperjanjikan.

Kondisi yang turut mempengaruhi pencapaian kinerja adalah adanya rasionalisasi anggaran pemeliharaan jalan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, refocusing anggaran ini mengurangi alokasi anggaran pemeliharaan sehingga terdapat beberapa ruas jalan yang pemeliharaannya tidak dilaksanakan.

Daftar pustaka

- Despa, D., Nama, G. F., Septiana, T., & Saputra, M. B. (2021). Audit Energi Listrik Berbasis Hasil Pengukuran Dan Monitoring Besaran Listrik Pada Gedung A Fakultas Teknik Unila. *Electrician*, 15(1), 33-38.
- Martinus and Suudi, Ahmad and Putra, Rahmat Dendi and Muhammad, Meizano Ardhi (2020) Pengembangan Wahana Ukur Kecepatan Arus Aliran Sungai. *Barometer*, 5 (1). Pp. 220-223. Issn 1979-889x
- Rohmalia, N., Nama, G. F., & Purwasih, N. (2021). Dashboard Monitoring Atmospheric Corrosion Sensor in Material Metal Using Laravel Framework. *Journal of Engineering and Scientific Research*, 3(1), 1-6.
- Republik Indonesia (2014), Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80). Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Republik Indonesia (2014), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Republik Indonesia (2011), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.

Provinsi Lampung (2019), Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. Bandar Lampung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung (2019), Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Bandar Lampung: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung (2020), Daftar Kondisi Jalan Provinsi Lampung hasil Survei Ruas Jalan Status Provinsi Bulan Desember Tahun 2020. Bandar Lampung: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.